

## RELASI POLITIK BIROKRASI DAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN PT. JHONLIN BATU MANDIRI DI KABUPATEN BOMBANA

Asriani<sup>1</sup>, La Ode Muhammad Elwan<sup>2</sup>, Dhani Himawan<sup>3</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo

Correspondent author: [muh.elwan@uho.ac.id](mailto:muh.elwan@uho.ac.id)

Kota Kendari, 93231, Sulawesi Tenggara, Indonesia

### Abstract

*The purpose of writing this article is to find out the relationship between the bureaucracy and the company PT. Jhonlin Batu Mandiri in Bombana Regency.*

*The research method used is a qualitative research type with a descriptive approach. The data analysis technique uses the opinion of Miles, Huberman & and Saldaña (2014) with an interactive model starting from data collection, data reduction, data presentation, and conclusions. Based on the results that have been obtained regarding bureaucratic relations and plantation companies which result in power politics in local government agencies that collaborate with entrepreneurs through clientelistic relations and market relations. As a result, in the regional relations position, bureaucratic and company cooperation occurred for the benefit of village infrastructure development, and in the market relations position, there was a claim for community plantation land from PT. Jhonlin Batu Mandiri in Tinabite Village, Lantari Jaya District, Bombana Regency. Market relations are short-term relations that are developed through the issue of company political promises to land owners, resulting in supply and demand.*

**Keywords: Bureaucracy; Clientelism Relations; Market Relations; Political Relations; Plantation Company**

### Abstrak

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui relasi politik birokrasi dan perusahaan PT. Jhonlin Batu Mandiri di Kabupaten Bombana. Metode penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian kualitatif pendekatan Deskriptif. Teknik analisis data menggunakan pendapat Miles, Huberman & Saldaña (2014) dengan model interaktif dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Berdasarkan hasil yang telah di peroleh dalam mengenai relasi birokrasi dan perusahaan perkebunan yang mengakibatkan politik kekuasaan pada instansi pemerintah daerah yang melakukan kerjasama dengan pengusaha melalui relasi klientalistik dan relasi pasar. Akibatnya pada posisi relasi klientalistik terjadi kerjasama birokrasi dan perusahaan demi keuntungan pembangunan infrastruktur desa dan pada posisi relasi pasar, terjadi mengklaim lahan perkebunan masyarakat dari PT.Jhonlin Batu Mandiri di Desa Tinabite Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana. Relasi Pasar tersebut merupakan relasi jangka pendek yang di kembangkan melalui isu janji politik perusahaan kepada pemilik lahan sehingga terjadi penawaran dan permintaan.

**Kata Kunci: Relasi Politik; Birokrasi; Relasi Klientalisme; Relasi Pasar; Perusahaan Perkebunan**

## PENDAHULUAN

Birokrasi di desain sebagai aparat publik yang diangkat oleh negara dan diasumsikan sebagai lembaga yang netral secara politik, dan tidak memiliki kekuasaan serta tanpa kepentingan. Terjadinya antara administrasi dan politik di Amerika, menjadikan birokrat terbagi ke dalam dua kategori, yaitu: pertama, *careerist* adalah aparat publik yang memiliki masa kerja yang panjang. Sehingga dianggap memiliki netralitas politik dan diasumsikan sebagai birokrat sesungguhnya. Kedua *transients* adalah aparat publik yang hanya memiliki masa kerja yang pendek, atau sering disebut aparat politik yang diangkat, dan karenanya tidak dianggap birokrat. Birokrat dengan kategori *careerist*, sangat memiliki kepentingan untuk menjaga kelangsungan karirnya, dibandingkan dengan birokrat yang memiliki masa kerja yang pendek yaitu *kategori transient*. Oleh karena itu, birokrat yang memiliki masa kerja panjang, lebih memiliki peluang untuk memainkan politik birokrasi, karena ia berorientasi pada kelangsungan karirnya dalam suatu institusi birokrasi, walaupun umumnya seringkali diasumsikan netral. Karena adanya dikotomi antara administrasi dan politik, maka birokrasi dipandang netral secara politik karena hanya mengimplementasikan kebijakan publik. Birokrasi juga senantiasa memiliki orientasi yang bersifat administratif dan politis, sehingga kinerja administratif birokrasi berhubungan dengan kekuasaan politik yang dimilikinya (Farazman). Sehingga, efektivitas proses birokrasi dapat tercapai optimal bila kekuasaan politik yang dimilikinya seimbang dengan institusi lainnya diluar birokrasi.

Birokrasi dan politik bagai dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Birokrasi dan politik memang merupakan dua institusi yang memiliki karakter yang berbeda, namun saling mengisi. Dua karakter yang berbeda antara ini memerlukan sisi positif terkait dengan sinergi, namun disisi lain tidak dapat dipisahkan dengan aroma perselingkuhan (Rozi,2006).

Ciri khas birokrasi adalah bentuk institusi yang berjangjang, rekrutmen berdasarkan keahlian, dan bersifat impersonal. Sedangkan politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebahagian besar warga untuk membawa masyarakat kearah kehidupan bersama yang harmonis (Budiarjo,2008). Politik, kekuasaan, dan birokrasi dalam dinamika pemerintahan Indonesia bagaikan kesatuan yang tidak terpisahkan. Hubungan ketiganya dapat dilacak dari sejarah awal pembentukan negara ini, dari masa kerajaan, zaman kolonial hingga setelah kemerdekaan. Tarik menarik politik dan kekuasaan berpengaruh kuat terhadap pergeseran fungsi dan peran birokrasi selama ini. Birokrasi yang seharusnya bekerja melayani dan berpihak kepada rakyat berkembang menjadi melayani penguasa dengan keberpihakan pada politik dan kekuasaan. Sampai saat ini, pengaruh kuat pemerintah terhadap birokrasi membuat sulitnya mesin birokrasi member pelayanan publik yang profesional, rentan terhadap tarik- menarik

kepentingan politik, korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi, dan berbagai penyakit birokrasi lainnya.

Ini semua adalah awal berkembangnya bisnis kekuasaan yang akan mengatur kegiatan bisnis rakyatnya. Dari sinilah muncul hubungan antara birokrasi, kekuasaan dan kalangan bisnis, suatu hubungan yang saling menunjang dan menghidupi dan efeknya adalah munculnya berbagai praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Fenomena yang ada saat ini adalah banyaknya birokrat yang melakukan kegiatan tambahan dengan menciptakan bisnis kekuasaan didalamnya, baik itu yang berkaitan dengan peraturan perizinan maupun proyek-proyek pembangunan.

Birokrasi dan politik adalah suatu alat atau instrumen suatu pemerintah untuk melaksanakan keputusan-keputusan serta kebijakan-kebijakan. Birokrasi menjadi penting karena merupakan suatu bentuk hierarki, yang diikat dengan sistem legislasi yang relatif luas dan mengalokasikan kewenangan serta legitimasi kekuasaan, kemudian mendistribusikannya dalam bentuk tugas-tugas pelayanan secara terpadu. Secara otomatis hal ini berkaitan dengan aspek hubungan atau relasi, sehingga birokrasi secara operasional bermakna sesuatu yang ingin dicapai sebagai tujuan dan mereka menerima gaji karena statusnya itu. Maka, apabila ada imajinasi pada setiap tingkat kegiatan, setiap sektor, setiap fungsionaris, ia tidak semata-mata mengarahkan lingkungan, tetapi juga melayani lingkungan masyarakat secara komprehensif dan integral.

Namun di sisi lain muncul praduga adanya azas manfaat pada para birokrat dan pengusaha, yang mempunyai koneksitas dan relasi dengan partai-partai politik yang menguasai pemerintahan dan birokrasi tertentu. Hal ini, ceteris paribus dengan patron-patron politik dan patron-client yang memanfaatkan turbulensi pembangunan ekonomi untuk melahirkan kartel politik.

Andre Krouwel merumuskan politik kartel sebagai suatu model yang muncul dalam organisasi partai dalam studinya di beberapa negara di kawasan Amerika Latin. Dalam artikel ini, istilah kartel politik merujuk pada istilah yang digunakan Yahya Muhaimin (1990) dalam buku *Bisnis dan Politik*, yang mengutip pendapat Herbert Feith tentang "*patronase*", yaitu mengenai peran partai politik, dimana partai-partai tersebut merupakan suatu saluran utama untuk dapat memasuki birokrasi dan kepentingan partai politik tertentu yang mempunyai relasi dengan birokrasi pemerintahan.

Tentunya saja kondisi tersebut secara otomatis dapat membentuk *Patron-clientalisme*.

Di dalam hal ini, Yahya Muhaimin menggunakan model pemikirannya yang disebut "*CLIENTILISM*". Model ini sebenarnya banyak sekali dikembangkan di dalam studi antropologi dan sosiologi. *Clientilism* itu sendiri sebenarnya untuk kajian mengenai Asia Tenggara bukanlah

hal yang baru sama sekali, karena James Scott lande yang khusus menggunakan kerangka yang sama untuk membahas politik di Philipina sudah banyak sekali mengungkapkannya. Apakah yang dimaksud dengan *clintilism* ?. Mungkin ada baiknya dijelaskan bagaimana kerangka hubungan yang bersifat "*clintilism*"

Hubungan yang clientilistic terjadi apabila terdapat dua orang atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama, yaitu antara "patron" dan "client".

Masing-masing pihak memiliki sejumlah "*resources*" atau sumber daya yang dapat dipertukarkan (*exchange*) satu sama lain yang menguntungkan. Si patron biasanya memiliki sumber daya cukup besar, misalnya perlindungan, rasa aman, fasilitas, kedudukan, lisensi, keuangan/dana, dan lain sebagainya. Sementara itu si Client menyediakan dukungan, dan tenaga (baik yang berwujud keahlian maupun tenaga kasar, seperti misalnya penggarap sawah pada tingkat lokal, demikian pula centeng). Dengan demikian terjadi hubungan yang timbal balik (*reciprocal*), akan tetapi sebenarnya yang paling besar menikmati hasil dari interaksi tersebut adalah si Patron. Tidak selamanya si Client akan menjadi client karena pada suatu waktu ia akan berfungsi sebagai "*brooker*?" atau apa yang disebut "*middleman*," atau perantara antara si patron dengan si client yang sesungguhnya. Hubungan tersebut tetap terpelihara kalau seandainya tetap saling menguntungkan, akan tetapi apabila masing-masing pihak sudah merasa bahwa hubungan tersebut tidak lagi menguntungkan maka dapat saja si patron mencari client yang baru ataupun si client mencari patron yang baru.

Seiring dengan alasan sistem ekonomi politik modern dewasa ini, domain negara harus dipisah dari domain swasta. Masing-masing memiliki ciri dan karakteristik berbeda serta diatur dengan aturan main yang berbeda pula. Campur aduk keduanya menyebabkan kedua sistem tersebut mengalami distorsi, yang akan berujung pada ketidakadilan, kesenjangan ekonomi, monopoli, dan korporatisme. Pengusaha memperoleh keuntungan dengan cara bukan persaingan yang sehat di dalam pasar. Kekuasaan dipakai untuk memengaruhi pasar sehingga mengalami distorsi untuk kepentingannya. Dalam praktiknya perburuan rente ekonomi, pelaku usaha mengundang kekuasaan atau memengaruhi kekuasaan untuk mengambil dari suatu nilai yang tidak dikompensasi.

Retorika tentang "pelayanan negara" mengandaikan bahwa para pejabat pemerintah bagaimanapun juga akan diarahkan untuk bertindak dalam kepentingan publik luas, meski dalam kenyataannya perilaku mereka secara empiris lebih dapat dijelaskan lewat motif-motif kepentingan pribadi yang lebih sempit. Perilaku para pejabat negara dapat dipengaruhi oleh suap, kampanye sumbangan hadiah kepada anggota keluarga, atau janji masa depan. Sejumlah besar aktivitas sektor swasta dengan demikian diselewengkan dari kewirausahaan menghasilkan kekayaan ke perburuan rente (Krueger 1974; Buchanan, Tullock, dkk, 1980). Memang tidak semua pengusaha yang berpolitik berdampak negatif.

Namun pengalaman empirik di negara berkembang menunjukkan, kemungkinan tabiat koruptif dari dwifungsi itu justru semakin membesar. Karena umumnya, motivasi utama para pengusaha atau 'taipan' berpolitik guna mempertahankan kepentingan bisnisnya (Harris, 2003). Tracking yang dilakukan menunjukkan, pebisnis di negara berkembang yang berpolitik adalah kroni kapitalis, bukan entrepreneur sejati. 'Kerajaan' bisnis yang dibangun bukan hasil persaingan usaha sehat dan inovasi bisnis, tetapi dari privilege dan konsesi yang diberikan patron politik. Yashiro Kunio (1990) menamakannya "kapitalis semu" (ersatz kapitalism), yaitu pengusaha yang tumbuh karena memiliki hubungan mesra dengan rezim.

Menurut Widanarto (2017) yang dimaksud dengan praktek *rent seeking* itu adalah perilaku pejabat publik dan/atau politisi yang hanya melayani dirinya sendiri atau penguasaan-penguasaan sumber daya yang memikirkan kepentingan pribadi dengan cara mencari celah-celah kebijakan publik atau pengalokasian anggaran dalam proyek-proyek pemerintah demi kepentingan memperkaya diri sendiri atau menguntungkan sebagian kelompok tertentu dengan tujuan penguasaan ekonomi-politik. Menurut Pahlevi dalam tulisannya berjudul Republik Rent-Seeker Indonesia (2013) menerangkan bahwa Rent Seeking juga dapat diartikan sebagai perilaku pengeluaran sumber daya untuk mengubah kebijakan ekonomi, atau menelikung kebijakan tersebut agar dapat menguntungkan pihak rent seekers. Dalam teori ekonomi klasik, konsep rent-seeking dinilai sebagai perilaku negatif karena mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Asumsi yang dibangun dalam teori ekonomi politik adalah, bahwa setiap kelompok kepentingan berupaya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya dengan upaya sekecil-kecilnya. Praktek rent seeking juga di kategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang, memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan fungsi dan memperkaya diri secara tidak sah. Untuk mengatasi terjadinya praktek rent seeking maka harus ada peraturan yang menjadi landasan hukum penangkapan pelaku rent seeking.

Teori yang mengkaji masalah itu dikenal dengan sebutan teori perburuan rente ekonomi ("*Theory of Economic Rentseeking*"). Teori tersebut menjelaskan fenomena perilaku pengusaha untuk mendapatkan lisensi khusus, monopoli dan fasilitas lainnya dari pihak yang berwenang, yang mempunyai kekuasaan atas bidang tersebut. Dengan lisensi khusus, maka dengan mudah pelaku yang lain tidak bisa masuk pasar. Karena itu, perilaku pemburu rente ekonomi biasanya merupakan perilaku antipersaingan atau menghindari persaingan.

Melihat konteks di tingkat lokal yang terjadi di Kabupaten Bombana, fokusnya di Desa Tinabite, Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana. Berawal dari perkembangan industri PT. Jhonlin Batu Mandiri atau di kenal dengan singkatan (JBM) yaitu berupa pabrik tebu/gula yang membutuhkan lahan seluas 150.000 hektar Area tersebut telah masuk di

wilayah hutan produksi yang dikelola oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Tina Orima. Luas kebun tebu PT Jhonlin menurut izin 20.000 ribu hektare. Lahan yang tak digarap peternak dan gembala berupa alang-alang yang kini sudah ditanami tebu. PT Jhonlin sudah membeli konsesi penanaman berupa sawahi dan sekitarnya untuk di jadikan lokasi pabrik gula. dimana lahan yang dibutuhkan untuk memberikan perubahan positif bagi masyarakat di kawasan pabrik dalam hal pembangunan ekonomi dan investasi.

Berdasarkan hasil observasi, menunjukan bahwa masyarakat sekitar sempat frustrasi karena tidak ada manajemen yang jelas dalam kontribusi tersebut, kemudian mereka kaget mengetahui bahwa lokasi tersebut di penuh dengan alat berat dan dijaga ketat serta diawasi oleh aparat kepolisian bersenjata lengkap. Salah satu instansi pengelola perkebunan di lingkungan Pemerintah Bombana adalah (UPTD) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Kesatuan Pengelolaan Hutan di Kabupaten Bombana, yang pada hakikatnya merupakan perkebunan tebu yang dikelola pada suatu lokasi yang ditetapkan oleh (KPH Tina Orima) atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Tina Orima, yang kewenangannya ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan. Mengenai pengelolaan perkebunan lahan tebu di Kabupaten Bombana pada dasarnya membutuhkan lahan yang sangat luas dan selama ini lahan tidak tersentuh oleh keberadaan industri tersebut setelah dimanfaatkan lebih dulu oleh masyarakat kurang lebih untuk perkebunan dan peternakan. Pada hal ini eksistensi perkebunan biasa mempengaruhi hak-hak masyarakat (petani, peternak dan penduduk setempat).

Tujuan pengembangan lahan untuk lokasi perkebunan tebu perusahaan dan pemerintah menyebabkan banyak pertanyaan mengenai lahan mereka yang telah di klaim perusahaan tersebut sehingga mengakibatkan konflik persengketaan lahan dalam sektor pengelolaan perkebunan tebu lalu apakah di maksud akan berjalan sesuai pembentukan peraturan daerah yang ada atau bagaimana relasi antara instansi agar pemerintah daerah benar benar konsisten dalam pelaksanaannya dalam hal pembangunan terkhususnya penataan ruang lahan perkebunan tersebut.

Kasus di atas dapat dijadikan dasar untuk menganalisis bagaimanakah relasi politik antara birokrasi dan perusahaan mengenai pengelolaan lahan perkebunan Di Desa Tinabite Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana.

Studi ini memberikan berbagai kepentingan dalam pengelolaan penataan ruang di lingkungan terutama penataan lahan perkebunan untuk kesejahteraan masyarakat untuk mengkonfirmasiakan diberbagai pihak membangun sosialisasi antara rencana pembangunan yang ditetapkan melalui peraturan dalam pelaksanaannya dan mengidentifikasi hubungan antara berbagai pihak.



## METODOLOGI

Penelitian dilakukan di Desa Tinabite Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana. Alasan pemilihan lokasi tersebut yaitu untuk mengetahui Relasi Birokrasi Dan Pengusaha Perkebunan yang berdiri di PT.Jhonlin Batu Mandiri Di Desa Tinabite Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana.

Rancang dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Bagdon dan Taylor (dalam Moelong, 2005:4). Menjelaskan tentang kualitatif yaitu prosedur penelitian yang dimana mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis serta lisan dari orang yang diamati. Pendekatan kualitatif di arahkan pada latar dan individu tersebut secara lengkap, maka hal ini tidak di perbolehkan mengisolasi seorang individu atau organisasi kedalam variable ataupun hipotesis tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Informan penelitian dapat diartikan sebagai orang yang dianggap memiliki kompetensi dan dipercaya dapat memberikan informasi valid dan reliable dalam lingkup penelitian ini, dalam artian orang yang mengerti mengenai kondisi dan situasi dari dasar dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data secara representif, maka informan kunci yang di maksud adalah orang memahami permasalahan dan berkaitan langsung dalam penelitian ini yakni Kepala Bidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana, Kepala Seksi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tina Orima Bombana, Direktur divisi humas perusahaan (PT. Jhonlin Batu Mandiri), Kepala desa dan tokoh masyarakat di Desa Tinabite Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada dua pembagian yaitu kombinasi antara data kualitatif dan kuantitatif, namun dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif deskriptif atau disebut juga data naratif, adalah data penelitian yang menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal-hal yang umumnya tidak dapat dihitung. Oleh karena itu, data yang di gunakan berdasarkan kualitas dari suatu objek atau fenomena yang ada dilapangan.

Sumber data berupa data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek penelitiannya. Jadi data primer yaitu data yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi pada pihak yang bersangkutan dalam tujuan penelitian, dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Jadi data sekunder yaitu data yang dikumpulkan berupa dokumen yang terkait dengan tujuan penelitian.

Selanjutnya teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah (1) Observasi adalah salah satu langkah mendapatkan data dengan proses pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah

penelitian sekaligus melakukan pencatatan mengenai informasi yang diperoleh dan memiliki kaitan dengan penelitian ini; (2) Wawancara adalah salah satu langkah untuk memperoleh dan mengumpulkan data melalui kegiatan dialog atau tanya jawab serta diskusi dengan narasumber atau informan yang memiliki pengetahuan mengenai objek dan masalah yang diteliti; (3) Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data-data secara langsung dari lokasi penelitian. Dokumentasi tersebut berbentuk beberapa jurnal yang relevan, buku-buku, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto dan data-data yang memiliki relevansi dengan kegiatan penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya dalam (Elwan et al., 2022). Kondensasi data merujuk pada proses seleksi, fokus studi, penyederhanaan, ringkasan dan transformasi data dengan tujuan untuk mengetahui Relasi Politik Birokrasi dan Pengusaha Perkebunan PT. Jhonlin Batu Mandiri Desa Tinabite Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Dwiyanto (2006:56) yang dikutip dari La Ode Muhammad Elwan. (2019) bahwa pemberian pelayanan publik oleh aparat pemerintah kepada masyarakat (publik) merupakan perwujudan dan fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat (abdi), disamping sebagai abdi negara. Dalam konteks ini masyarakatlah sebagai aktor utama (pelaku) pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang kegiatan-kegiatan dari masyarakat tersebut. Pada kondisi ini aparat negara dituntut untuk lebih mampu memperbaiki kinerjanya (pelayanan prima) dan diharapkan lebih mampu merumuskan konsep atau menciptakan iklim yang kondusif, sehingga sumber daya pembangunan dapat menjadi pendorong percepatan terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Pelayanan yang telah menunjuk kepada aturan formal dianggap telah memenuhi sendiri pelayanan yang baik dan aparat pelayanan dianggap telah konsisten dalam menerapkan aturan hukum pelayanan. (Muhammad Elwan, 2019). Untuk itu dibutuhkan kerja nyata dari aparat Birokrasi dalam menemukan formulasi pelayanan yang benar dengan memosisikan dirinya sebagai tuan kepada pengguna layanan (warga dan pelaku usaha). Pada posisi ini, diharapkan berikrasi tau dirinya seperti yang dikemukakan oleh Weber dalam (Bakti, Ode, & Elwan, 2018), bahwa sumber legitimasi dari birokrasi berasal dari aturan yang berlaku (legalitas formal). Dalam konsep Weber birokrasi sebagai aparat administratif mempunyai peran yang menentukan tumbuh dan berkembangnya organisasi tersebut, sehingga perhatian Weberian ini lebih kepada struktur (birokrasi) yang telah diatur secara normatif dan mekanisme untuk mempertahankan struktur tersebut untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi. (Bakti et al., 2018).

### **Tata Ruang Wilayah Perkebunan Masyarakat Desa Tinabite Kabupaten Bombana**

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Bombana 2013-2030, lahan di Tanabite dan desa-desa



sekitarnya memang diperuntukkan bagi ladang penggembalaan dan persawahan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 yang memuat ketentuan tata ruang itu, nama ladang penggembalaan tersebut adalah dusun lababu dengan luas 11 ribu hektare. Seperti dikutip Majalah Tempo edisi 9 September 2019 dengan judul "Gula-gula Dua Saudara", PT Jhonlin mendapatkan konsesi perkebunan tebu di Bombana. Menteri Pertanian Amran Sulaiman bahkan turun tangan untuk membantu perizinan perusahaan tersebut. Amran membenarkan pernah mengumpulkan pejabat pemerintahan di Sulawesi Tenggara membahas investasi Isam.

Area tersebut masuk wilayah hutan produksi yang dikelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Tina Orima. Total luasnya 150 ribu hektare. Luas kebun tebu PT Jhonlin menurut izin 20 ribu hektare. Lahan yang tak digarap peternak dan gembala berupa alang-alang, yang kini sudah ditanami tebu. PT Jhonlin sudah membeli konsesi perusahaan tambang emas di sekitarnya untuk lokasi pabrik gula.

PT Jhonlin mengklaim masuk wilayah itu karena sudah menjalin kerja sama dengan KPHP Tina Orima. Dalam perjanjian, lahan-lahan di Tinabite, termasuk yang diklaim Marjuni, berstatus hutan produksi. "Sesuai dengan izin, kami akan menjadikannya ladang tebu," kata Direktur PT Jhonlin Batu Mandiri Mochamad Arif Efendi.

Adapun data wilayah lahan yang di klaim oleh pihak PT.Jhonlin Batu Mandiri terletak di Dusun Lababu dengan jumlah kepala keluarga 27 KK dan luas lahan perkebunan dan peternakan 11.000 Ha. (Sumber; data Desa Tinabite Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana, 2023).

### **Profil Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit X Tina Orima Kabupaten Bombana**

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tina Orima Kabupaten Bombana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang dimana kewenangannya telah diatur dan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara NO 80 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model X Tina Orima mempunyai luas± 115.093 hektar, terletak di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan penetapan KPHP Tina Orima merupakan KPH dengan luas 116.126 ha. Namun berdasarkan hasil analisis Sistem Informasi Geografis (SIG) yang bersumber dari hasil pemetaan, pengecekan lapangan dan konsultasi publik dalam rangka penyusunan rencana pengelolaan KPHP Tina Orima diperoleh luas 115.113,15 ha. Sehingga kajian yang digunakan dalam dokumen rencana pengelolaan ini adalah 115.113,15 ha tetapi

berdasarkan data pemutahiran kawasan hutan berdasarkan penetapan kawasan hutan pada kompleks hutan G. Mendoke sesuai keputusan menteri kehutanan No.SK.6583/menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 luas wilayah KPHP Model Bombana (unit X) menjadi seluas ± 115.093 ha. Fakta menunjukkan bahwa terjadi missing data yang kita tidak ketahui sumber data mana yang mesti digunakan untuk ditetapkan kebenarannya.

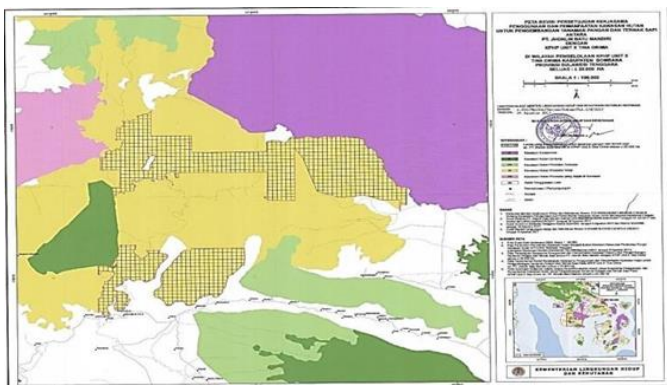
**Profile Company PT. Jhonlin Batu Mandiri (JBM).**

PT. Jhonlin Batu Mandiri adalah perusahaan yang didirikan pada tanggal 30 April 2014 berdasarkan akte pendirian perseroan no 31 yang di buat oleh notaris Muhammad Hanafi, SH yang telah mendapatkan pengesahan pendirian Perseroan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia Nomor AHU-15099.40.10.2014 tertanggal 26 Juni 2014. Kemudian, dalam perjalanannya telah beberapakali mengalami perubahan anggaran dasar perseroan dan terakhir dirubah berdasarkan akte pernyataan keputusan para pemegang saham nomor 29 tanggal 22 Januari 2018 yang di buat oleh notaris Muhammad Hanafi, SH.

**Wilayah Koneksi PT Jhonlin Batu Mandiri**

Areal kerjasama dibahas secara luas dalam Rencana Kerja Usaha (RKU), Tata batas areal kerjasama dilaksanakan sebagai tata batas terluar areal kerjasama yang berada didalam wilayah pengelolaan KPHP Unit X Tina Orima. Penataan batas luar areal kerjasama dilakukan berdasarkan peta sesuai gambar 1.

Gambar 1 Peta wilayah kerjasama KPHP Tina Orima dengan JBM.



Sumber: KPHP Tina Orima

Pemasangan batas areal kerjasama di lakukan satu pal batas areal kerjasama adapun jumlah target rencana pelaksanaan batas blok areal kerjaama pada KPHP Tina Orima isajikan pada tabel 1.

**Tabel 1.** Jumlah Target Rencana Pelaksanaan Penataan Batas Blok Areal Kerjasama

| Uraian                    | Panjang Batas |                           | Rencana Pelaksanaan (Tahun) |
|---------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|
|                           | Km            | Titik Koordinat Geografis |                             |
| Batas buatan (batas Luar) | 102,30        | Terlampir                 | 2017 s/d 2018               |

Sumber: Rencana Kerja Usaha kerjasama PT. Jhonlin Batu Mandiri dengan KPHP Tina Orima.

Pengembangan perkebunan tebu pada kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) Model Unit X Tina Orima yang dikelola oleh pihak JBM mempunyai luas ±20.000 ha, dengan membagi-bagi areal ke dalam beberapa blok yaitu: blok perlindungan, blok hasil hutan kayu, blok pengembangan ternak dan hijauan makanan ternak, dan blok sarana prasarana dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Blok perlindungan: blok perlindungan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (sumber mata air, kiri-kanan sungai, plasma nutfah, sepondan danau/sungai, buffer zone hutan lindung /kawasan konservasi, dll). Blok yang dilindungi ini juga termasuk areal untuk keperluan religi dan budaya masyarakat hukum adat setempat.
2. Blok hasil hutan kayu: blok yang dimanfaatkan untuk budidaya pohon atau hutan.
3. Blok pengembangan ternak dan hijauan makanan ternak (hmt): merupakan blok yang dimanfaatkan untuk pengembangan ternak dan budidaya.
4. Blok sarana Prasarana: blok sarana prasarana merupakan blok yang tidak dimanfaatkan untuk budidaya pohon dan hmt, yaitu: sungai, danau, gudang, bangunan kantor, dsb.

Berdasarkan tujuan penelitian dan penulisan ini maka penulis menggunakan teori Ralp Miliband (1969), Trotsky (1937) tentang bentuk relasi kekuasaan yang terbangun antara birokrasi dan perusahaan perkebunan tebu Di Desa Tinabite Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana, melalui relasi klientalistik dan relasi pasar sebagai indicator kajian.

#### **A. Relasi Klientalistik Birokrasi dan Perusahaan Perkebunan**

Sejak di resmikan perusahaan PT jhonlin batu mandiri atau biasa di kenal dengan (PT.JBM) pada tahun 2018 di lahan perkebunan desa tinabite kecamatan lantari jaya kabupaten bombana menuai konflik persengketaan lahan masyarakat, dengan keluarnya izin perusahaan tersebut melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana atau (DPMPTSP) kabupaten bombana.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa keluarnya izin dari pemerintah daerah untuk pembangunan perusahaan dan perkebunan di Desa Tinabite merupakan relasi yang saling menguntungkan di tiap instansi dimana birokrasi mempunyai kekuasaan lebih besar ketimbang masyarakat karena untuk pembangunan infrastruktur di daerah dan diharapkan pemerintah daerah mendapatkan penghasilan dari pihak perusahaan berupa pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan daerah.

Namun dalam perjalanannya, operasionalisasi Perusahaan tebu tersebut tidak semudah yang mereka bayangkan, karena status lahan yang di klaim Perusahaan mendapat protes dari warga sekitar. Hal ini sesuai dengan penyapaian dari informan bapak Rustam selaku

Kepala Seksi Kesatuan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan (KPPH), Tina Orima:

“ adapun bentuk negosiasi kepada masyarakat sangat sulit mengenai lahan yang akan di kelola oleh perusahaan tersebut karena kebanyakan masyarakat yang telah lebih dulu tinggal dan mengelola lahan tersebut mereka tidak mengikuti peraturan yang di tetapkan oleh pemerintah dan kami selaku dari kesatuan pengelola hutan cuman bisa mengikuti arahan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dari situlah terjadinya sebuah konflik antara kesatuan pengelola hutan dan masyarakat desa tinabite tentang lahan masyarakat yang tak mempunyai izin ataupun sertifikat tersebut (wawancara, 21 mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi Relasi Klientalistik antara Birokrasi dan Perusahaan Perkebunan. Hasil peneloitian menunjukan bahwa Posisi Birokrasi terkesan tidak memberikan ruang bagi warga sekitar untuk melakukan complain atau keberatan atas lahan yang sudah begitu di olah oleh mereka. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa telah terjadi kolaborasi antara pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak Perusahaan untuk memuluskan segala urusan tentang operasional Perusahaan perkebunan. Masyarakat tereksan di abaikan dan pemerintah kurang peduli terhadap masalah yang warga alami dengan adanya Perusahaan perekebunan tersebut.

Temuan penelitian juga menemukan bahwa perusahaan perkebunan mengklaim lahan perkebunan di desa tinabite karena adanya surat perjanjian dimana birokrasi mengeluarkan surat izin untuk investasi perusahaan mendapatkan keuntungan di mana dalam keuntungan tersebut bisa mengklaim lahan masyarakat desa tinabite guna untuk pembangunan perusahaan dan lahan perkebunan adapun keuntugan dari pemerintah adanya sumber pendapatan pajak retribusi dari perusahaan.

Hal ini sesuai hasil wawancara Bapak Hasanuddin HR selaku Kepala Desa Tinabite yang menyatakan bahwa:

“mengenai pola kerja sama antara pihak perusahaan dan pemerintah daerah terhadap masyarakat saya selaku kepala desa tinabite mengetahui problem yang ada pada kerja sama tersebut karena masyarakat kami merasakan adanya perampasan lahan tanpa adanya sosialisasi dari pemerintah maupun perusahaan tersebut di mana lahan tersebut mengatas namakan lahan milik pemerintah yang berdasarakan izin dari pemerintah daerah, tetapi sejak di klaimnya lahan masyarakat kami perusahaan bisa memfasilitasi desa kami sebagai mana penjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dan perusahaan untuk memfasilitasi desa kami.”

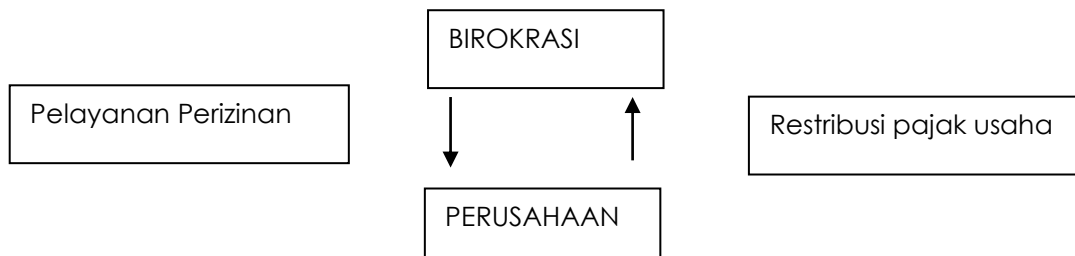
Hubungan yang sifatnya klientelistik itu terjadi apabila dua instansi atau lebih mempunyai kepentingan yang sama, yaitu antara patron dan klien. Hubungan ini didefinisikan sebagai kepedulian khusus antara perusahaan dan birokrasi yang terkait dalam persahabatan instrumental, dimana yang berstatus tinggi dalam bidang sosial-ekonomi memberikan perlindungan dan keuntungan untuk masyarakat yang berstatus rendah yang telah memberikan jasa dan pelayanan. Gejala patron-klien ini bisa muncul dan bertahan karena adanya kondisi sosial yang mendukungnya. perusahaan perkebunan telah mencoba

mengukur biaya politik dengan melihat mekanisme pertukaran langsung jasa dan pelayanan membujuk masyarakat untuk kemajuan prasarana perekonomian di tingkat nasional.

### **Pola Relasi Klientalistik Yang Saling Menguntungkan**

Dalam bentuk pola relasi klientalistik birokrasi dan perusahaan perkebunan terbagi ke dalam satu spesifik. Berikut adalah bentuk pola relasi klientalistik, yang melibatkan masyarakat Desa Tinabite tentang pelayanan perizinan usaha perusahaan perkebunan. Pola relasi antara birokrasi dan perusahaan perkebunan yang di dalamnya pemerintah daerah mengeluarkan izin untuk perusahaan karena adanya peningkatan di sector perekonomian yang di tanggung oleh perusahaan terhadap masyarakat desa tersebut dan memberikan layanan pekerjaan di industry di perusahaan perkebunan adapun keuntungan yang didapatkan oleh birokrasi yaitu adanya Pendapatan Asli Daerah berupa pajak dari perusahaan perkebunan guna untuk peningkatan swasembada pangan. Berikut model relasi klientalistik antara birokrasi dan Perusahaan perkebunan tebu seperti pada Gambar 2.

**Gambar 2.** Model relasi klientalistik antara birokrasi dan perusahaan



Gambar 2 menunjukkan bahwa terdapat keseriusan oleh perusahaan guna pembangunan dalam sector perekonomian dan memfasilitasi infrastruktur desa melalui perizinan agar proses pertukaran kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Bagi masyarakat keuntungan tersebut hanya berdampak pada jangka pendek, sedangkan bagi perusahaan dan pemerintah daerah dari hasil dari upaya itu akan berdampak pada jangka panjang, dan bisa menunjang jenjang kariernya.

### **B. Relasi Pasar Antara Birokrasi Perusahaan Dan Masyarakat**

Melihat apa yang terjadi pada masyarakat berkaitan dengan Undang undang, birokrasi dan perusahaan mengembangkan sebuah isu bahwa adanya sarana pembangunan segi makro di area lahan tersebut masyarakat yang di klaim lahannya akan di bangun sebuah sarana infrakstruktur seperti pembangunan lahan persawahan dengan sertifikat resmi dari pemerintah, penataan lahan peternakan dan pembangunan jembatan menuju desa tersebut ini akan saling mempengaruhi, dipengaruhi, demikian juga sebaliknya. perusahaan membutuhkan dukungan melalui masyarakat dan penataan lahan

melaui kesatuan pengelola hutan, Keadaan seperti inilah yang kemudian menciptakan hubungan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan dalam perpolitikan.

Hubungan simbiosis mutualisme yang saling mendapatkan keuntungan perusahaan dengan masyarakat, yang mudah terlihat adalah seperti kehadiran birokrasi di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk pendampingan masyarakat, Selain itu perusahaan juga merealisasikan janji mereka dengan menghadirkan di pembangunan fasilitas umum infrastruktur seperti (perbaikan jalan memperkerjakan masyarakat daerah tersebut guna untuk meminimalisir tingkat pengangguran) Semua upaya oleh birokrasi dan pengusaha ini bukanlah semata pemberian secara gratis, di balik semua itu di antara pemerintah dan perusahaan telah melakukan kesepakatan. Kesepakatan tersebut adalah berupa keuntungan dimana keuntungan tersebut berupa kualitas pembangunan perusahaan perkebunan untuk meningkatkan kualitas perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk retribusi pajak daerah.

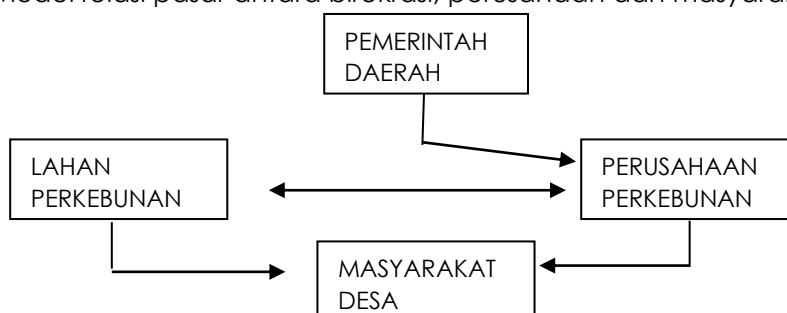
Pada prinsipnya, Relasi pasar berkewajiban untuk mendorong akses ekonomi produktif, dimana yang terbangun karena isu yang diusung oleh pemerintah daerah dan perusahaan kepada masyarakat. Dari sinilah terjadi pertemuan antara permintaan dan penawaran antara birokrasi, perusahaan dan masyarakat.

Adapun isu yang di kembangkan oleh birokrasi dan perusahaan tersebut antara lain :

1. Perusahaan menjamin bahwa berdirinya lahan perkebunan perusahaan di daerah tersebut dapat meningkatkan kualitas perekonomian di sector industri dan meminimalisir tingkat pengangguran di daerah .tersebut
2. Pemerintah daerah mendapatkan retribusi pajak dari perusahaan untuk pendapatan asli daerah. Salah satu sarana yang di harapkan kepada masyarakat yaitu pembenahan jalanan atau infrastruktur desa penataan lahan persawaahan dan ladang peternakan.
3. Adapun dari masyarakat daerah karena adanya sebuah tanggung jawab yang di keluarkan oleh perusahaan dan pemerintah bahwa di belinya lahan kepada masyarakat yang tak memiliki izin tersebut akan di ganti di tata kan lahan oleh pemerintah, demi kemajuan perekonomian daerah dan kemajuan tingkat daerah bentuk segi makro.

Berikut gambaran model relasi pasar antara birokrasi perusahaan dan masyarakat terkait pembangunan lahan perusahaan perkebunan tersebut:

**Gambar 3.** Model relasi pasar antara birokrasi, perusahaan dan masyarakat





Gambar 3 menunjukkan bahwa model relasi pasar antara birokrasi, perusahaan, dan masyarakat yaitu birokrasi mendatangkan perusahaan perkebunan tersebut guna untuk kemajuan di sector perekonomian masyarakat dengan cara perusahaan menawarkan masyarakat untuk menjual lahan tersebut dengan alasan pembangunan dalam segi makro dan masyarakat meminta bahwa dalam pembangunan lahan perkebunan di desa akan meningkatkan kualitas masyarakat daerah.

Hal ini dilakukan karena adanya hubungan relasi pasar yang berkaitan antara birokrasi, perusahaan dan masyarakat daerah untuk pembangunan lahan perkebunan yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, ketahanan pangan nasional dan kemajuan masyarakat desa melalui penawaran dan permintaan masyarakat terhadap birokrasi dan perusahaan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil dalam penelitian ini maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa relasi birokrasi dan perusahaan perkebunan tebu di Kabupaten Bomabana dapat dilihat dari 2 indikator, yaitu melalui relasi klientalistik dimana birokrasi dan perusahaan perkebunan mengupayakan pembangunan perkebunan tebu untuk saling mendapatkan keuntungan di lahan masyarakat desa karena berdasarkan dimana birokrasi dan perusahaan mempunyai nilai kekuasaan yang besar melalui patron clien yang memanfaatkan stabilitas pembangunan ekonomi untuk melahirkan kartel politik perusahaan merangkul semua kebijakan birokrasi untuk mendukung semua program pemerintah kekuasaan yang mengatur sumber pendapatan Negara. Adapun relasi pasar antara birokrasi perusahaan yang mengembangkan sebuah isu kepada masyarakat guna untuk sebuah pencapaian yang saling menguntungkan antara lain melalui program pemerintah dan perusahaan yang menawarkan sebuah pekerjaan dan pembangunan mikro guna untuk kemajuan di tingkat perekonomian daerah.

## REFERENSI

### Buku

- Abdullah, Taufik & Karim, Rusli. 1989. Metodologi Penelitian Agama Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Tiarawacana.
- Brannen, Julia, 2005, Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Budi Setiono, 2005,, Jaring Birokrasi Tinjauan Dari Aspek Politik dan Administrasi", Jakarta, Gugus Press
- Campbell, D.T., & Stanley, J C., 1963, Experimental and Quasiexperimental Designs For

---

Research, Chicago, IL: Rand Mc Nally.

Creswell, John W, 2010, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Dwiyanto, Agus, 2006, *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Jogja.

Kunio, Yoshihara, . September, 1999, *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*, Jakarta, LP3ES

Moleong ,lexy. (2005).*Metodologi penelitian kualitatif*.Bandung: PT.

Remaja Rosdakarya.

R.Martini., *Pengembangan, Penjaminan, dan Pendidikan*,(2013). *Politisasi Birokrasi Di Indonesia*.

Sutoro eko, (2004), *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*, APMD Press, Yogyakarta.

Schmandt, Hendri. J. (2002). *Filsafat Politik (Terjemahan Kajian Historis dari zaman Yunani Kuno sampai zaman Modern)*, Ahmad Baidlowi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Usman, Sunyoto. 2005. *Esai-Esai Sosiologi Perubahan Sosial*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

#### **Jurnal:**

A, Gide. (1967). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 4(1), 5–24.

Bakti, O. :, Ode, L., & Elwan, M. (2018). *ANALISIS RESTRUKTURISASI BIROKRASI DALAM PENGEMBANGAN GOOD GOVERNANCE PADA SEKERTARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA*. 1(3), 1–13. Retrieved from <http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO>

D, Rofifah. (2020).*Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.

Denhardt, R.B. & J.V. Denhardt, 2000. "The New Public Service", dalam *Public Administration Review*, Vol 60, No. 6.

Emi Kholifah. (2010). *Konsep Pertambangan*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–24. <http://teori-pertambangan.html>.,

Grindle Merilee S. (1980). *Policy Content and Context in Implementations in*, dalam merilee s. Grindle Ced.

G.A, Usman ., Saleh, L. M. I., Negeri, M., Mangkurat, L., Kalimantan, P., & Usman, A. G. (1998). *Bab i pendahuluan a. latar belakang*. 1–10.

I, Hidayat. (2009). *Kekuasaan Politik di Desa*. Ilmu Politik, c

La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). *MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi*. *Journal Publicuho*, 5(3), 626–642. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18>

Macintyre, Andrew. (1991). *Business and Politics in Indonesia*, Allen and Unwin Pty Ltd, Australia.

Muhammad Elwan, La Ode. "Problem Birokrasi dalam Meningkatkan Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Muna." *Journal Publicuho*, vol. 2, no. 2, 2019, pp. 31-42, doi:[10.35817/jpu.v2i2.7223](https://doi.org/10.35817/jpu.v2i2.7223).

Vargo, and Lusch. (2004). 'The Four Services Marketing Myths: Remnants from a Manufacturing Model', *Journal of Service Research* 6(4): 324–35.

Widanarto, A. (2017). *Praktek Rent Seeking: Budaya Korupsi Baru Di Kalangan Politisi dan Birokrasi Indonesia*.*Jurnal Politiokom Indonesian*.

Yahya, Muhaimin, (1988) *Kebijaksanaan Ekonomi dan Klientelisme*, Yogyakarta, Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada.

Yahya, A. Muhaimin. (1990). *Bisnis dan Politik:Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, LP3ES.

**Dokumen perUndang undang:**

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan.

Undang-Undang No 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor/P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016

Tentang Kerjasama Penggunaan Dan Pemanfaatan Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Ketahanan Pangan.

**Sumber lain (laman internet):**

<https://nasional.tempo.co/read/1246012/kebun-tebu-haji-isam-di-bombana-diduga-tabrak-aturan-tata-ruang>

<https://nasional.tempo.co/read/1245437/ada-menteri-pertanian-diduga-di-kebun-tebu-haji-isam/full&view=ok>

<https://www.sultranet.com/pt-jhonlin-di-duga-serobot-lahan-warga/>

<https://sultrapost.id/diduga-serobot-lahan-warga-pt-jhonlin-bakal-di-seret-ke-dprd-bombana/>

<https://sultrapost.id/pt-jhonlin-bantah-serobot-lahan-phk-sepihak-dan-tak-bayar-retribusi-pajak-imb/>

<https://zonasultra.com/pt-jhonlin-kuasai-20-ribu-hektar-lahan-bombana-peternak-dirugikan.html>